

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PAREPARE**



OLEH

**RIRIN ANGGREANI
NIM 17.2900.013**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PAREPARE**



OLEH

RIRIN ANGGREANI

NIM 17.2900.013

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare

Nama Mahasiswa : Ririn Anggreani

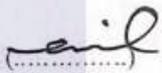
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.013

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

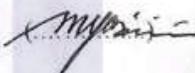
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.1243/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

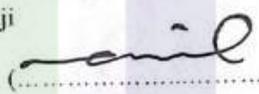
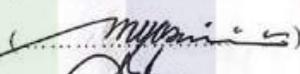
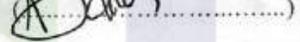



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP: 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare
Nama Mahasiswa : Ririn Anggreani
Nim : 17.2900.013
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.1243/In.39.8/PP.00.9/3/2021
Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) 
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Sekretaris) 
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) 
Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., berkat hidayah , taufik, dan amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Jamilah, Ayahanda tercinta Muhammad Amin, serta saudara-saudariku tercinta Dwi Amanda dan Arkan Ramadhan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag. M.A sebagai Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta Alfiani Faradillah dan Reski Eka Putri Ramadhani yang selalu mendukung saya selama mengerjakan skripsi.

10. Sahabat Seperjuangan Rahmat, Agung Iswanto, Ridwan Nurdin, Ahmad Adriansah, dan Dedy Indardi yang menjadi teman dikala susah dan senang dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Manajemen Keuangan Syariah atas dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terima Kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi.

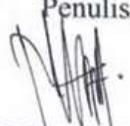
Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberi saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

PAREPARE

Parepare, 1 November 2021
25 Rab. Awal 1443 H

Penulis,


RIRINANGGREANI
NIM. 17.2900.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

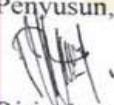
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ririn Anggreani
Nim : 17.2900.013
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 19 Juni 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 November 2021

Penyusun,


Ririn Anggreani
17.2900.013

PAREPARE

ABSTRAK

Ririn Anggreani. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Parepare*. (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair, dan Moh. Yasin Soumena).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah sedangkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui seberapa baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Parepare (2) mengetahui seberapa baik Belanja Daerah di Parepare (3) mengetahui apakah ada korelasi/hubungan Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Parepare (4) mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare (5) mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare (6) dan untuk mengetahui Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah di Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas dengan jenis penelitian metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan instrument penelitian skala ordinal dan dokumentasi data sekunder. Analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda dengan yang dianalisis bersumber dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan bantuan program SPSS IBM versi 21.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengujian *One Sample T-test* menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar $2.161 < 2.570$, sedangkan nilai Dana Perimbangan (X_2) sebesar $2.188 < 2.570$ ini menunjukkan bahwa bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. (2) Pengujian *One-Sample Test* menunjukkan nilai Belanja Daerah (Y) $2.217 < 2.570$, ini menunjukkan bahwa bahwa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. (3) Pengujian korelasi *Product Moment* diketahui bahwa ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y) dan memiliki korelasi positif. (4) Hasil dari pengujian Regresi Linear Sederhana menunjukkan nilai $t_{hitung} 3.258 > t_{tabel} 3.182$ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. (5) Hasil dari pengujian Regresi Linear Sederhana menunjukkan nilai $t_{hitung} 4.535 > t_{tabel} 3.182$ menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. (6) Pengujian tabel *Coefficient Analisis Regresi Linear Berganda*, Dana Perimbangan yang paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Karena $X_2 (\beta_2) > X_1 (\beta_1)$ dimana $0,990 > 0,972$.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah

DAFTAR ISI

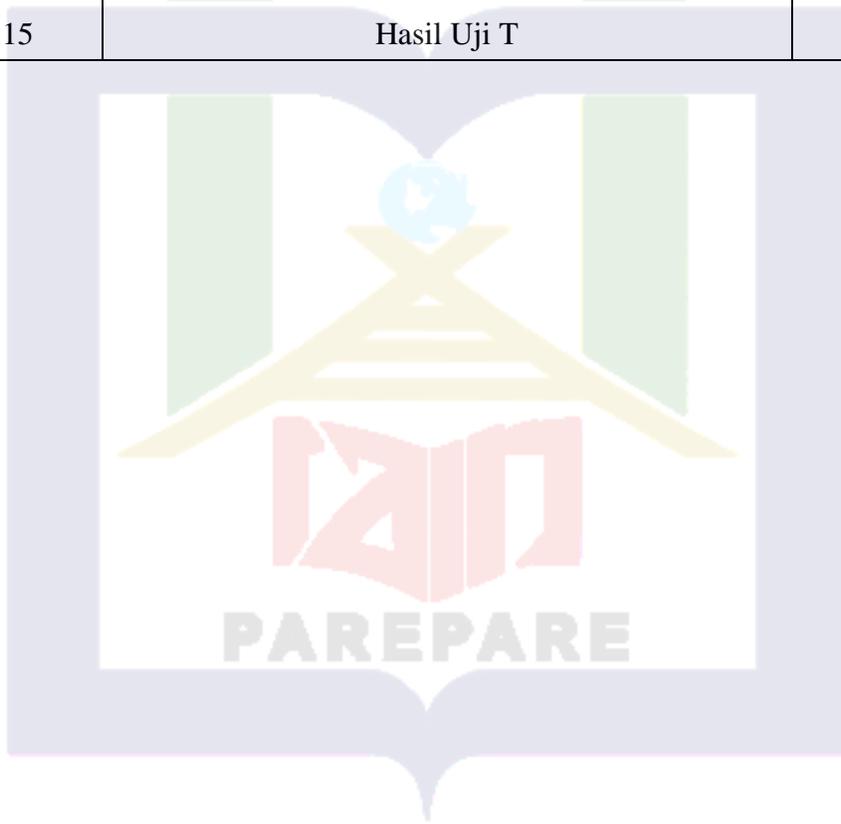
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D.Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A.Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10

C. Kerangka Pikir.....	33
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Definisi Operasional Variabel.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian	45
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data.....	47
C. Pengujian Hipotesis.....	64
D. Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Parepare 2017-2019	4
1.2	Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kota Parepare 2017-2019	4
3.1	Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan	42
4.1	Data Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2017-2019	45
4.2	Hasil Uji Statistik Dekskriptif	46
4.3	Hasil Uji Normalitas menggunakan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	48
4.4	Hasil Uji Multikolonieritas	50
4.5	Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Metode <i>Run Test</i>	51
4.6	Hasil Uji <i>Sample T-test Statistic</i> Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)	53
4.7	Hasil Uji <i>One Sample Test</i> Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)	54
4.8	Tingkat Klasifikasi	55
4.9	Hasil Uji <i>Sample T-test Statistic</i> Belanja Daerah (Y)	58

4.10	Hasil Uji <i>One Sample Test</i> Belanja Daerah (Y)	58
4.11	Hasil Uji <i>Correlations</i> Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Daerah (Y)	60
4.12	Hasil Uji <i>Correlations</i> Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (Y)	62
4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
4.14	Hasil Uji F	66
4.15	Hasil Uji T	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
4.1	Uji Normalitas menggunakan Normal P-Plot	49
4.2	Uji Heteroskastisitas menggunakan Scatterplot	50



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Data PAD, DAPER dan Belanja Daerah	63
2	Lampiran Hasil SPSS	70
3	Lampiran Tabel Uji F	75
4	Lampiran Tabel Uji R <i>Product Moment</i>	106
5	Lampiran Uji T	110
6	Lampiran Izin Pelaksanaan Penelitian Kampus IAIN Parepare	111
7	Lampiran Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	112
8	Lampiran Keterangan Selesai Meneliti Badan Keuangan Daerah Kota Parepare	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan setiap daerah di Indonesia sejalan dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah menekankan pada peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pesatnya perkembangan daerah dengan berkembangnya kegiatan perpajakan/fiscal yang memerlukan alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar dan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk mendanai kegiatan tersebut.¹ Belanja Pemerintah Daerah (Belanja) yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai kegiatan operasional di lingkungan pemerintahan. Dengan meningkatnya pengeluaran, sumber daya yang signifikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.²

Belanja daerah merupakan alokasi yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif.

¹Juliana Florence Sorogan, "Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA : Vol 1 No.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akutansi Universitas Sam Ratulangi Manado. September 20113, h. 171-172

²Anjar Setiawan, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang 2010, h. 17

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kota. Undang-undang ini mengatur agar pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus.³

Kebutuhan akan peningkatan belanja, pemerintah negara bagian atau kabupaten/kota tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya, dana transfer tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah.

Bentuk perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang dimulai dari pusat. Dana perimbangan diberikan oleh kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang dananya berasal dari pendapatan APBN yang diberikan.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah melalui pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah, di samping sumber keuangan dari Dana Perimbangan. Penerimaan daerah awal dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang digunakan daerah untuk penyelenggaraan

³Rizka Rahmalia, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”. Skripsi : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang 2020, h. 2

pemerintahan dan belanja pembangunan untuk meminimalkan ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat.

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan kewenangannya. Namun pada kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber utama pendanaan belanja daerah di pemerintah daerah. Kekurangan transfer dana tersebut ditutupi oleh sumber pendanaan yang unik, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴ Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah dari Bidang Pajak Daerah, Pajak Daerah, Hasil Usaha Daerah, Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah Orang Pribadi, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah.⁵

Masalah yang dihadapi pemerintah daerah di lembaga publik adalah masalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah total alokasi dana untuk setiap program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk belanja daerah yang produktif, dan selanjutnya agar tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2017-2019. Berikut data yang dikumpulkan oleh peneliti.

⁴Kristina Handayani, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi". Skripsi : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta 2009, h. 15-16

⁵Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 132

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota
Parepare 2017-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
2017	917.926.285.143	969.858.823.856
2018	823.930.414.122	790.230.343.853
2019	966.446.325.592	923.316.280.348

Sumber Data : Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>)

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perimbangan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2017-2019. Berikut data yang dikumpulkan dari peneliti.

Tabel 1.2 Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kota Parepare
2017-2019

Tahun	Dana Perimbangan			Belanja Daerah
	DBH	DAU	DAK	
2017	19.106.889.524	454.752.410.000	201.051.860.222	969.858.823.856
2018	17.329.795.867	454.752.410.000	127.529.699.403	790.230.343.853
2019	13.893.249.840	474.983.198.000	156.841.688.487	923.316.280.348

Sumber Data : Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>)

Pada tabel 1.1 perbandingan antara PAD mengalami kenaikan atau penurunan yang menunjukkan bahwa belanja daerah belum cukup stabil dalam pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan semakin menurun setiap tahunnya, terutama untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan terus meningkat untuk Dana Alokasi Umum (DBU).

Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang tidak merata di semua kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan di kota Parepare. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam desentralisasi untuk menguraingi disparitas antar kabupaten/kota.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus inilah yang mentransfer dana dari pusat ke daerah. Pemerintah ingin menekankan isu ketidakberpihakan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan. Ini akan memungkinkan dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk menutupi pengeluaran Kota Parepare.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Seberapa baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Parepare?
2. Seberapa baik Belanja Daerah di Parepare ?
3. Apakah ada korelasi/hubungan Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Parepare ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare ?
5. Apakah Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare?

⁶Rizka Rahmalia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)". Skripsi : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang 2020, h. 8-9

6. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh secara simultan (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap Belanja Daerah di Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Parepare ?
2. Untuk mengetahui seberapa baik Belanja Daerah di Parepare ?
3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi/hubungan Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Parepare ?
4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare?
5. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare?
7. Untuk mengetahui Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh secara simultan (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap Belanja Daerah di Parepare?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Di Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah dan departemen yang terkait, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare.
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Masayu Rahmawati dan Catur Martian Fajar (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”.⁷ Hasil penelitian menyatakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan ditunjukkan untuk menandai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

Perbedaan dari penelitian Masayu Rahmawati dan Catur Martian Fajar dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan objek penelitian di Kota Bandung sedangkan penulis di Kota Parepare. Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah penggunaan variabel bebas. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan.

2. Penelitian yang dilakukan Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten

⁷Masayu Rahmawati dan Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”. Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, 2017.

Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto dengan dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang digunakan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel dependen Belanja Modal, sedangkan penulis tidak menggunakan variabel Belanja Daerah yang tidak digunakan dalam penelitian Fiona Puspita Devi. Objek penelitian Fiona Puspita Devi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penulis di Kota Parepare. Persamaan antara penelitian Fiona Puspita Devi dengan penelitian penulis adalah pada variabel bebas yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.

3. Penelitian yang dilakukan Kesit Bambang Prakosa (2004) yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”.⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya Belanja Daerah di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Secara

⁸Fiona Puspita Devi Purwanto, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

⁹Kesit Bambang Prakosa, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”. JAAI Volume 8 No.2, Desember 2004.

simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam prediksi Belanja Daerah, daya prediksi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan daya prediksi Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan penelitian Kesit Bambang Prakoso dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian Kesit Bambang Prakoso adalah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis di Kota Parepare. Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah penggunaan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

B. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁰ Sementara menurut Darise Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.¹¹

¹⁰Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 132

¹¹Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. (Jakarta: Indeks, 2008), h. 135

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undang yang berlaku.

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain di luar yang ditetapkan undang-undang. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD,dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya

hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak sebagai berikut:¹²

- a) Iuran masyarakat kepada Negara
- b) Berdasarkan Undang-undang
- c) Tanpa balas jasa secara langsung
- d) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak Daerah dirinci menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Adapun yang dimaksud pajak daerah yaitu:

¹²Husni Wahyuni, "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar". Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, h. 19

- a) Jenis Pajak Daerah Provinsi terdiri dari:
- (1) Pajak kendaraan bermotor
 - (2) Bea balik nama kendaraan bermotor, dan
 - (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b) Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
- (1) Pajak hotel dan restoran. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
 - (2) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tari modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
 - (3) Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- (4) Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (5) Pajak Parkir, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C/Mineral bukan logam dan Batuan (BMLB), h pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.
- (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah. Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; atau diluar pelepasan hak. Hak atas tanah

dan/ atau bangunan meliputi: Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan.¹³

2) Restribusi Daerah

Menurut Saragih (2003), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.¹⁴ Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi. Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini sendiri merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah

¹³Mardiasmo, *Peroajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15

¹⁴Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi fiskal dan Keuangan daerah dalam otonomi*. (Jakarta: Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h. 65

karena seseorang dan atau badan hukum menggunakan barang dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

Jenis-jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengelolaan Yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada badan usaha milik daerah (BUMD) saja, tetapi dapat pada badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok usaha masyarakat.¹⁵

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kakayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Undang-undang No 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau

¹⁵Icuk Ranga Bawono dan Mochamad Novelsyah, *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 15-16

BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar.

Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁶

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti :

- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan,
- b) Jasa Giro,
- c) Pendapatan Bunga Deposito,
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
- e) Komisi,
- f) Potongan dan Selisih Nilai Tukar,
- g) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
- h) Pendapatan Denda Pajak,
- i) Pendapatan Denda BPHTB,
- j) Pendapatan Denda Retribusi,
- k) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan,
- l) Pendapatan dari Pengembalian,
- m) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum,
- n) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
- o) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan
- p) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

¹⁶Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung, Steeva Y.L Tumangkeng, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara Periode 20019-2016". Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 2018, h. 126

2. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.¹⁷ Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.¹⁸ Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat

¹⁷Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 69

¹⁸Prof. Drs. HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 129

kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.¹⁹Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak / dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas:

- a) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

¹⁹Try Indraningrum, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2011, h. 43

- b) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
- c) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nordiawan DAU adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensidaerah.²⁰

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka

²⁰Nordiawan, Deddi dan Ayuningtiayas, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010) h. 26

pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.²¹

Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, dilain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum.²²

Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Perimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar

²¹Arbie Gugus Wandira, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 30

²²Anjar Setiawan, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2010, h. 42

wilayah, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif, dan untuk meningkatkan keberterimaan Pajak Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagiandari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.²³

Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- b) Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

²³Rima Marlia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Bandung)". Universitas Komputer, h. 3-4

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.²⁴

²⁴Diah Sulistyowati, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja". Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 26

Bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:

- a) DAK bidang perikanan dan kelautan, Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi serta pyediaan sarplas terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.
- b) DAK bidang pertanian, Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.
- c) DAK bidang keluarga berencana, Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.
- d) DAK bidang kehutanan, Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutam di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.
- e) DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal
- f) DAK bidang sarana perdagangan, Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan.

- g) DAK bidang energi pedesaan, Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.
- h) DAK bidang perumahan dan permukiman, Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- i) DAK bidang keselamatan transportasi darat, Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkantingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.²⁵

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

3. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang

²⁵Endang,Maya Lestari Siregar” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara”. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019, h. 46-48

mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.²⁶ Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum daerah sebagai pengurang kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.²⁷

Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17 : 26-27.

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا (٢٦)
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.²⁸

Maksud dari ayat di atas hendaknya pemerintah membelanjakan pendapatannya untuk belanja yang bersifat produktif untuk pelayanan kepada masyarakat dengan prioritas anggaran ke belanja-belanja yang dimanfaatkan dan di gunakan langsung oleh masyarakat, karena perbuatan boros merupakan saudara saitan yang sangat

²⁶Anjar Setiawan, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. 2010, h. 50

²⁷Arif, Bahtiar, Muchlis, & Iskandar. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Akademia, 2009), h. 188

²⁸*Al-Qur'an Al-Karim*

ingkar kepada Allah SWT, tetapi selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada Belanja Daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kategori Belanja Daerah

1) Belanja Daerah menurut organisasi

Perincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah, lembaga teknis daerah, dan struktur organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah diantaranya: DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Lembaga Teknis, dan Kelurahan.

2) Belanja Daerah menurut fungsi

Perincian Belanja Daerah menurut fungsi merupakan pengklasifikasian Belanja Daerah sesuai kewenangan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut meliputi: layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.²⁹

²⁹Icuk Ranga Bawono dan Mochamad Novelsyah, *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 20-22

c. Klasifikasi Belanja Daerah

Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut fungsinya digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.³⁰

Menurut Budi S. Purnomo (2009), menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Sedangkan klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung.³¹

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas:

- a) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil.

³⁰Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. (Bandung: Fokusmedia, 2010) h. 99

³¹Budi S. Purnomo, *Obligasi Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h.43

- b) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang/pinjaman daerah baik yang bersifat pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang.
- c) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Pihak-pihak tertentu seperti kepada: pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah daerah di luar wilayah provinsi, atau hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah provinsi atau dari provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD, perusahaan negara/BUMN dan masyarakat.
- e) Belanja Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan kepada partai politik merupakan salah satu contoh dari bantuan sosial.
- f) Belanja Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang

dibagikan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi. Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa dapat dikelompokkan ke dalam bantuan bersifat umum (block grant) atau bantuan bersifat khusus (specific grant). Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa tertentu yang pedoman penggunaannya dapat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan prioritas provinsi/kabupaten/kota atau sesuai dengan usulan kabupaten/kota/pemerintahan desa yang membutuhkan.
- h) Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran guna penanganan bencana alam, bencana sosial atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

- a) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.³²

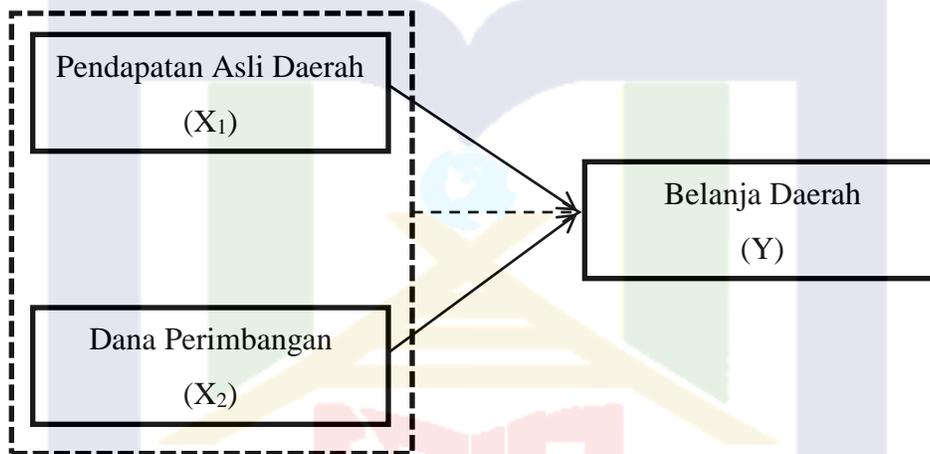
C. Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

³²Rima Marlia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Bandung)". Universitas Komputer, h. 4-5

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Keterangan :

X_1 = Variabel Independen (Bebas), Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Variabel Independen (Bebas), Dana Perimbangan

Y = Variabel Dependen (Terikat), Belanja Daerah

—————> = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

- - - - -> = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut maka dapat dijelaskan bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ = Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) Dan Dana Perimbangan (X2) memiliki pengaruh yang baik di Parepare
- H₂ = Variabel Belanja Daerah (Y) di Parepare memiliki pengaruh yang baik di Parepare
- H₃ = Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Parepare
- H₄ = Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare
- H₅ = Variabel Dana Perimbangan (X2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Parepare
- H₆ = Variabel Dana Perimbangan yang paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah (Y) di Parepare

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data, instrumen pengumpulan data serta teknik analisis data.³³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang didesain untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antarvariabel, pada umumnya hubungan sebab-akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara dan variabel terikat.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keangan Daerah Kota Parepare dengan mengambil data melalui website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan data laporan realisasi APBD Kota Parepare selama periode 2017-2019. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020), h.53

³⁴Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 14

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), h.

Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id. Adapun waktu penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁶ Populasi yang diambil oleh penulis adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Parepare mulai tahun 2017-2019 atau sebanyak 3 tahun..

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka dilakukan dengan teknik yang digunakan sesuai dengan judul penulis yaitu non probability sampling. Jenis *non probability sampling* yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota dijadikan sampel.³⁷

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data APBD dan Realisasi APBD Kota Parepare dari situs dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 80

³⁷Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 68

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah (Y), indikator sumber penghasilannya yaitu:
 - a. Belanja Langsung, terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
2. Pendapatan Asli Daerah (X_1), indikator sumber penghasilannya yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana Perimbangan (X_2), indikator sumber penghasilannya yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut :

1. Skala Ordinal

Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau tingkatan melalui penilaian tertentu.

2. Dokumentasi dan Data Sekunder

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, data laporan keuangan dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Analisis Regresi Linier Berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu uji normalitas data, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, uji *one sample t test*, uji korelasi. Metode analisis linier berganda dinilai koefisien determinasi, uji t, dan uji f. Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika

data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t (periode tertentu)

dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi.

e. *One Sample T-Test*

One sample t-test bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan apakah satu sampel sama/berbeda dengan rata-rata populasinya. Dalam melakukan uji *one sample t-test* terlebih dahulu kita harus memenuhi asumsi dari uji *one sample t-test* dengan melakukan uji normalitas.

Kaidah pengujian Uji normalitas:

Jika Probabilitas (sig.) > 0,05, maka data berdistribusi normal.

Jika Probabilitas (sig.) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

e. Uji Korelasi *Person Product Moment*

Uji *Pearson Product Moment* dapat dilakukan jika data setiap butir pernyataan telah valid/sesuai dan reliabel/konsisten. Uji tersebut mengkorelasikan apakah ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik analisis ini termaksud teknik analisis statistic parametric yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu.

Uji *Pearson Product Moment* yang dilakukan akan menampilkan tabel *descriptive statistics* dimana Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (Y) meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai standar deviasi (*std. deviation*) dan jumlah data yang diolah.

Korelasi *Product Moment* dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negative sempurna;

$r = 0$ artinya tidak ada korelasi; $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan table interpretasi nilai r sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
0,80% – 1,000%	Sangat Kuat
0,60% – 0,799%	Kuat
0,40% – 0,599%	Sedang
0,20% – 0,399%	Lemah
0,00% – 0,199%	Sangat Lemah

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Y = Variabel Dependen (Terikat), Belanja Daerah)

X₁ = Variabel Independen (Bebas), Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Variabel Independen (Bebas), Dana Perimbangan

3. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi linier berganda untuk variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi yang dilihat adalah nilai dari adjusted R^2 .

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

b. Uji F

Merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Melalui uji F (ANOVA) kita akan mengetahui apakah Pendapatan Asli berpengaruh dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah.

c. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji T dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig (*p-Value*) di

bawah 5%. Melalui uji t ini kita akan mengetahui apakah Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Objek dari penelitian adalah Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa dokumen laporan realisasi APBD Kota Parepare tahun 2017-2019 yang didapatkan di situs situs dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id , yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), dan Belanja Daerah. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2017-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
TA2017	Rp. 997,417,871,424	Rp. 637,484,105,000	Rp. 1,026,887,348,924
RA 2017	Rp. 917,926,285,143	Rp. 674,911,159,746	Rp. 969,858,823,856
TA2018	Rp. 910,963,347,048	Rp. 608,741,841,000	Rp. 875,365,795,694
RA 2018	Rp. 823,930,414,122	Rp. 599,611,905,270	Rp. 790,230,343,853
TA 2019	Rp. 931,658,852,156	Rp. 660,209,347,000	Rp. 939,823,221,581
RA 2019	Rp. 966,446,932,592	Rp. 645,718,136,327	Rp. 923,316,280,348

Sumber Data : data sekunder yang diolah

Pada penelitian ini terdapat 3 data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi.

Dari hasil pengumpulan data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah di Kota Parepare Tahun 2017-2019, maka nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	6	823930414122	997417871424	924723950414.17	59107031175.969
Dana Perimbangan	6	599611905270	674911159746	637779415723.83	29137324257.748
Belanja Daerah	6	790230343853	1026887348924	920913635709.33	81415149664.893
Valid N (listwise)	6				

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan diatas dengan jumlah 6 sampel dapat dijelaskan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 823930414122 atau sama dengan Rp. 823,930,414,122, nilai maximum sebesar 997417871424 atau sama dengan Rp. 997,417,871,424 , dan mean (rata-rata)

sebesar 924723950414.17 atau sama dengan Rp. 924,723,950,414.17 dan standar deviasi sebesar 59107031175.969 atau setara dengan Rp. 59,107,031,175.969.

2. Dana Perimbangan. Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 599611905270 atau sama dengan Rp. 599,611,905,270, nilai maximum sebesar 674911159746 atau sama dengan Rp. 674,911,159,746, dan mean (rata-rata) sebesar 637779415723.83 atau sama dengan Rp. 637,779,415,723.83 dan standar deviasi sebesar 29137324257.748 atau setara dengan Rp. 29,137,324,257.748.
3. Dana Perimbangan. Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 790230343853 atau sama dengan Rp. 790,230,343,853, nilai maximum sebesar 1026887348924 atau sama dengan Rp. 1,026,887,348,924, dan mean (rata-rata) sebesar 920913635709.33 atau sama dengan Rp. 920913635709.33 dan standar deviasi sebesar 81415149664.893 atau setara dengan Rp. 81,415,149,664.893.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*

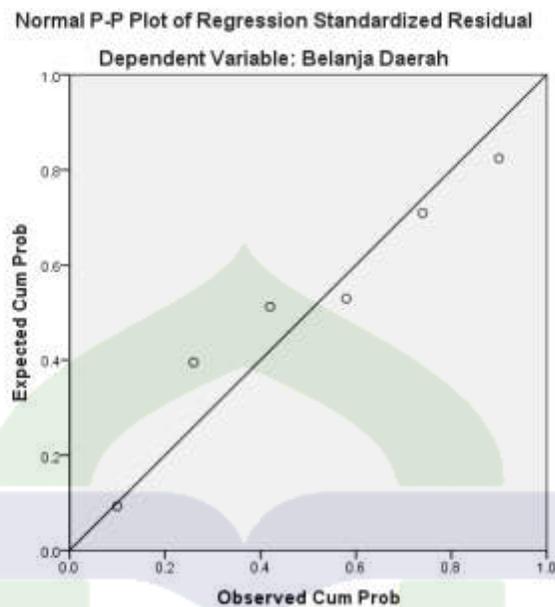
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001335
	Std. Deviation	27843507425
	Absolute	.192
Most Extreme Differences	Positive	.118
	Negative	-.192
Kolmogorov-Smirnov Z		.471
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.3 Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dari pengelolaan SPSS hasil di dapat berdasarkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, adalah 0,979 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.



Gambar 4.1 Uji Normalitas menggunakan Normal P-Plot

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan gambar 4.1 memperlihatkan penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

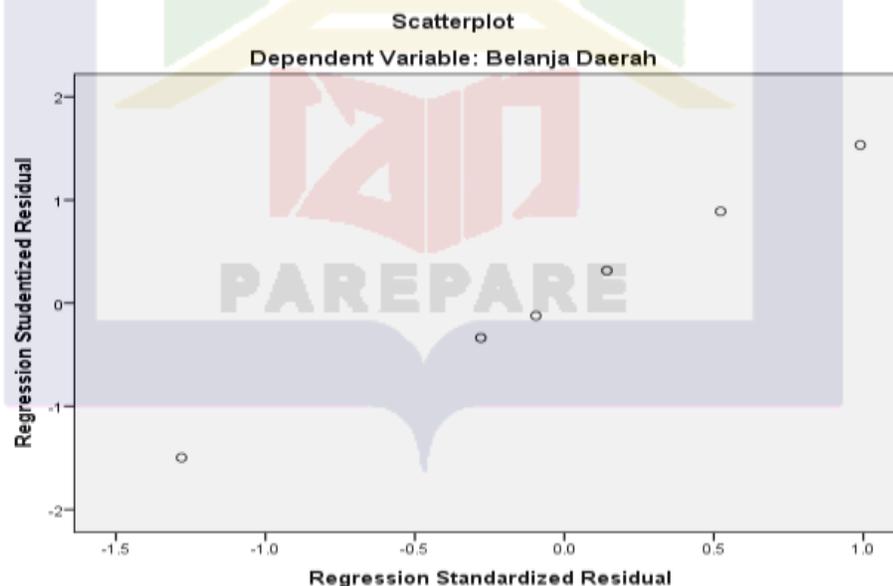
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pendapatan Asli Daerah	.732	1.366
Dana Perimbangan	.732	1.366

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa variabel-variabel diatas memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t (periode tertentu) dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu cara untuk melakukan pengujian autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Run Test*. Hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Run Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Metode *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	852829446.39971
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Cara pengambilan keputusan uji autokorelasi metode *Run Test* adalah jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji autokorelasi dengan metode *Run Test*, diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 1,000. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($1,000 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

e. *One Sample T-Test*

One sample t-test bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan apakah satu sampel sama/berbeda dengan rata-rata populasinya. Dalam melakukan uji *one sample t-test* terlebih dahulu kita harus memenuhi asumsi dari uji *one sample t-test* dengan melakukan uji normalitas. Peneliti sudah melakukan uji normalitas seperti pada hasil tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal yang menyatakan bahwa kita dapat melakukan uji *one sample t test*.

Kaidah pengujian Uji normalitas:

Jika Probabilitas (sig.) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

Jika Probabilitas (sig.) $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

1) Pengujian *one sample t test* pada Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)

Uji *one-sample t test* pada Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) yang dilakukan akan menampilkan *tabel one-sample statistics* dimana berisi tentang statistik data Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) meliputi jumlah data (N), nilai rata-rata (*mean*), nilai standar

deviasi (*Std. Deviation*) dan nilai standar error rata-rata (*Std. Error Mean*). Nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji *Sample T-test Statistic* Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan Asli Daerah	6	924723950414.17	59107031175.969	24130344431.983
Dana Perimbangan	6	637779415723.83	29137324257.748	11895262816.917

Sumber data: data sekunder yang diolah, SPSS 21

Hasil tabel 4.6 diatas menunjukkan jumlah data Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) (N) sebesar 6 data. Pendapatan Asli Daerah (X1) nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 924,732,950,414.17, nilai standar deviasi (Std. Deviation) sebesar Rp. 59,107,031,175,969, dan nilai standar error rata-rata (Std. Error Mean) sebesar Rp. 24,130,344,431.983.

Sedangkan Dana Perimbangan (X2) nilai rata-rata (mean) Rp. 637,779,415,723.83. Std Deviation sebesar Rp. 29,137,324,257.749. Dan untuk Std. Error Mean untuk variabel X2 sebanyak Rp. 33,237,595,668.552.

Pada *one-sample t test* yang dilakukan pada data Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X1) akan muncul tabel *one-sample test* yang berisi nilai tes dugaan (*test value*), nilai thitung, nilai frekuensi distribusi (*df*), nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*), nilai beda rata-rata (*Mean Difference*), nilai beda ambang tingkat kepercayaan (*Confidence Interval of the Difference*). Nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji *One Sample Test* Pendapatan Asli Daerah (X1)
dan Dana Perimbangan (X2)

One-Sample Test

	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pendapatan Asli Daerah	2.161	5	.083	3091390617 080.834	-5855528203 02.68	6768334054314. 35
Dana Perimbangan	2.188	5	.080	2304446082 390.500	-4026708129 29.70	5011562977560. 70

Sumber data: data sekunder yang diolah, SPSS 21

Tabel 4.7 *one-sample t test* diatas dari hasil diperoleh Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan nilai tes dugaan (*test value*) sebesar 75, nilai t_{hitung} sebesar 2.161, nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,083, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*) sebesar 3,091,390,617,080.834, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar -585,552,820,302.68 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 6,768,334,054,314.35.

One-sample t test diatas dari hasil diperoleh Dana Perimbangan (X2) dengan nilai tes dugaan (*test value*) sebesar 75, nilai t_{hitung} sebesar 2.188. nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,080, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*) sebesar 2,304,446,082,315.500, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar -402,670,812,929.70 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 65,011,562,977,560.70

Sesuai dengan kaidah pengujian maka:

Kaidah pengujian (1)

Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Kaidah Pengujian (2)

Jika nilai probabilitas $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

Jika nilai probabilitas $> \alpha$, maka H_0 diterima.

Nilai $\alpha =$ signifikansi 5% (0,05)

Tabel 4.8 Tingkat Klasifikasi

Skor	Klasifikasi
84,01% - 100%	Sangat baik
68,01% - 84,00%	Baik
52,01% - 68,00%	Sedang
36,01% - 52,00%	Buruk
20,00% - 36,00%	Sangat buruk

Berdasarkan hipotesis Pendapatan Asli Daerah (X1) ditentukan:

H_0 = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75%

H_a = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tidak sebesar 75%

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar $2.161 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.161 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75%. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,083 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75% dari nilai ideal yang

diharapkan , artinya jika mengacu pada tabel klasifikasi 4.8 diatas, nilai sebesar 75% ditarik kesimpulan bahwa bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.

Nilai dugaan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah yaitu 75% dari nilai ideal yang diharapkan, maka Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. Pendapatan Asli Daerah dinilai dapat mengelola keuangannya secara baik dan produktif. Dengan meningkatnya jumlah belanja daerah yang semakin pesat pendapatan asli daerah juga diharapkan mendapatkan sumber penerimaan bukan hanya dari sector pajak, retribusi daerah, hasil pemisahan kekayaan, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil PAS sah lainnya. Apabila PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat.

Berdasarkan hipotesis Dana Perimbangan (X_2) ditentukan:

H_0 = Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75%

H_a = Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah tidak sebesar 75%

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dari Dana Perimbangan (X_2) sebesar $2.188 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.188 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75%. Nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*) sebesar $0,080 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75% dari nilai ideal yang diharapkan , artinya jika mengacu pada tabel klasifikasi 4.8 diatas, nilai sebesar 75% ditarik kesimpulan bahwa bahwa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.

Nilai dugaan Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah yaitu 75% dari nilai ideal yang diharapkan, maka Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan yang bertujuan untuk menciptakan kesimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dinilai sudah cukup baik dalam mengelola keuangannya. Dana perimbangan juga sudah dapat membantu PAD dalam membiaya belanja daerah. Jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Perimbangan maka Belanja Daerah akan semakin rendah.

2) Pengujian *one sample t test* pada Belanja Daerah (Y)

Pengujian *one sample t test* pada Belanja Daerah (Y) yang dilakukan akan menampilkan *tabel one-sample statistics* dimana berisi tentang statistik data Belanja Daerah (Y) meliputi jumlah data (N), nilai rata-rata (*mean*), nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) dan nilai standar error rata-rata (*Std. Error Mean*). Nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.9 *One Sample Statistics* Belanja Daerah (Y)

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Belanja Daerah	6	920913635709.33	81415149664.893	33237595668.552

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Hasil tabel 4.9 diatas menunjukkan jumlah data Belanja Daerah (Y), (N) sebesar 6 data, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 920,913,635,709.33., nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 81,415,149,664.893, dan nilai standar error rata-rata (*Std. Error Mean*) sebesar 33,237,595,668.552. Pada *one-sample t test* yang dilakukan pada data data Belanja Daerah (Y) akan muncul *tabel one-sample test* yang berisi jumlah data Belanja Daerah (Y), yaitu nilai tes dugaan (*test value*), nilai thitung, nilai frekuensi distribusi (df), nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*), nilai beda rata-rata (*Mean Difference*), nilai beda ambang tingkat kepercayaan (*Confidence Interval of the Difference*). Nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 *One Sample Test* Belanja Daerah (Y)

One-Sample Test						
Test Value = 75						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Belanja Daerah	2.127	5	.087	1754246969 042.667	- 366080389924.1 3	3874574328009.4 6

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Tabel *one-sample t test* diatas dari hasil diperoleh nilai tes dugaan (*test value*) sebesar 75%, nilai t_{hitung} sebesar 2.127, nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*) sebesar 0,087, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*)

sebesar 1,754,246,969,042.667, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar - 366080389924.13 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 3,874,574,328,009.46.

Berdasarkan hipotesis Dana Perimbangan (Y):

H_0 = Pengaruh Belanja Daerah sama dengan nilai 75%

H_a = Pengaruh Belanja Daerah tidak sama dengan 75%

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai t_{hitung} dari Belanja Daerah (Y) sebesar $2.217 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.217 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,087 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%, dari nilai ideal yang diharapkan artinya jika mengacu pada tabel 4.8 klasifikasi diatas, nilai 75% dari nilai ideal sebesar 100%, sehingga kesimpulan yang diambil yaitu bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dinilai "baik".

Nilai dugaan dari Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 100%, maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dinilai "baik". Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dinilai baik dalam melakukan pengeluaran dengan pelaksanaan program yang relative adil dan merata.

f. Uji Korelasi *Person Product Moment*

1) Uji *Pearson Product Moment* yang dilakukan akan menampilkan tabel *correlations* dimana Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Daerah (Y) meliputi nilai korelasi (*Pearson Correlation*), nilai signifikansi (*Sig. (2-tailed)*) dan jumlah data (N) yang diolah. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.11 *Correlations* Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	.889*
	Sig. (2-tailed)		.018
	N	6	6
Belanja Daerah	Pearson Correlation	.889*	1
	Sig. (2-tailed)	.018	
	N	6	6

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Tabel 4.11 diatas menunjukkan nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 0,889, nilai nilai signifikansi (*Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,018 dan jumlah data responden (N) sebanyak 6 data.

Hipotesis:

H_0 : Ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

H_a : Tidak terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis Statistik:

$H_0 : r = 0$

$H_a : r \neq 0$

Dasar pengambilan keputusan:

Jika nilai Sig. (*2-tailed*) $< \alpha$, maka H_0 diterima.

Jika nilai Sig. (*2-tailed*) $> \alpha$, maka H_0 ditolak.

Diketahui nilai signifikansi (α) 5% (0,05).

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh nilai Sig. (*2-tailed*) sebesar 0,018, yang berarti bahwa nilai Sig. (*2-tailed*) $0,018 < 0,05$, maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan dan memiliki korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah.

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
0, 80% – 1,000%	Sangat Kuat
0,60% – 0, 799%	Kuat
0, 40% – 0, 599%	Sedang
0, 20% – 0, 399%	Lemah
0, 00% – 0, 199%	Sangat Lemah

Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) 0,889 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikan sebesar 0,018. Nilai korelasi (*pearson correlation*) sebesar 0,889 (0,889%), dengan mengacu pada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan maka tingkat hubungan 0,889% berada pada 0,80% - 1,000%, yang berarti “sangat kuat”. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan tingkat hubungan yang “sangat kuat”.

2) Uji *Pearson Product Moment* yang dilakukan akan menampilkan tabel *correlations* dimana Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (Y) meliputi nilai korelasi (*Pearson Correlation*), nilai signifikansi (Sig. (2-tailed)) dan jumlah data (N) yang diolah. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.12 *Correlations* Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

		Dana Perimbangan	Belanja Daerah
Dana Perimbangan	Pearson Correlation	1	.720
	Sig. (2-tailed)		.015
	N	6	6
Belanja Daerah	Pearson Correlation	.720	1
	Sig. (2-tailed)	.015	
	N	6	6

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 0,720, nilai

nilai signifikansi (Sig. (2-tailed)) sebesar 0,015 dan jumlah data responden (N) sebanyak 6 data.

Hipotesis:

H_0 : Ada hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

H_a : Tidak terdapat hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Hipotesis Statistik:

$H_0 : r = 0$

$H_a : r \neq 0$

Dasar pengambilan keputusan:

Jika nilai Sig. (2-tailed) $< \alpha$, maka H_0 diterima.

Jika nilai Sig. (2-tailed) $> \alpha$, maka H_0 ditolak.

Diketahui nilai signifikansi (α) 5% (0,05).

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,015, yang berarti bahwa nilai Sig. (2-tailed) $0,015 < 0,05$, maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan dan memiliki korelasi antara Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y).

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
0, 80% – 1,000%	Sangat Kuat
0,60% – 0, 799%	Kuat
0, 40% – 0, 599%	Sedang

0, 20% – 0, 399%	Lemah
0, 00% – 0, 199%	Sangat Lemah

Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) 0,720 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikansi sebesar 0,015. Nilai korelasi (*pearson corelation*) sebesar 0,720 (0,720%), dengan mengacu pada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan maka tingkat hubungan 0,720% berada pada 0,60% - 0,799%, yang berarti “kuat”. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan tingkat hubungan yang “kuat”.

C. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- 1) Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- 2) Jika Kd menjauhi nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 ^a	.883	.805	35945813519

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan tabel 4. 13 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variable bebas dan variable terikat memiliki hubungan yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Perimbangan (X2) memiliki hubungan yang kuat dengan Belanja Daerah, dan dilihat dari koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,883. Hal ini berarti 88,3% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Perimbangan (X2) sedangkan sisanya ($100\% - 88,3\% = 11,7\%$) dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini..

b. Uji F

Uji statistik “F” atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Perimbangan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Sedangkan Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka hipotesis ditolak. Maka artinya Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Perimbangan (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Tabel 4.14 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29265828446131 366000000.000	2	14632914223 06568300000 0.000	11.325	.040 ^b
1 Residual	38763045286532 96000000.000	3	12921015095 51098700000 .000		
Total	33142132974784 663000000.000	5			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,325. Karena nilai F hitung $11,325 >$ F tabel 6,944, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini tercermin pula dari tingkat signifikan pada table diatas, dimana tingkat signifikan pada table diatas,

dimana tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,040. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama, maka akan berpengaruh pada Belanja Daerah. Jika PAD dan DAPER naik secara bersama-sama maka Belanja Daerah juga akan naik.

c. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$.

Tabel 4.15 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-361367117 609807452904. 992	399.071		-1.688	.190
¹ Pendapatan Asli Daerah	.972	.318	.706	3.258	.047
Dana Perimbangan	.990	.645	.354	4.535	.022

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 21

1. Uji Hipotesis 1

Hasil analisis regresi linier sederhana pada table 4.15 dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = -609807452904.992 + 0.972 X_1$$

- a) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar -609807452904.992 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol maka besarnya nilai Belanja Daerah adalah - 609.807.452.904.992. Sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0.972 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0.972 atau 97.2% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- b) Pengujian signifikansi antara bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi adalah sebesar 0,050 < 0,05 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 3.258, sementara nilai t table $\alpha = 0,05$; N = 6 dan k = 2 (t tabel = $t_{(\alpha/2; N-k-1)} = t_{0,05/2; 6-2-1} = t_{(0,025; 3)}$ dilihat dari distribusi tabel adalah sebesar 3.182. Nilai t hitung $3.258 > 3.182$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Berdasarkan hasil hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dapat diterima. Nilai signifikansi 0,050 yang lebih kecil 0,05 menyatakan menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t hitung sebesar 3.258 yang

lebih besar dari t tabel 3.182 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

2. Uji Hipotesis 2

Hasil analisis regresi linier sederhana pada table 4.15 dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = -609807452904.992 + 0.990 X_2$$

- a) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar -609807452904.992 menyatakan bahwa jika Dana Perimbangan sama dengan nol maka besarnya nilai Belanja Daerah adalah -609.807.452.904.992. Sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0.990 menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan meningkat sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0.990 atau 99.0% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- b) Pengujian signifikansi antara Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi 0,022 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,022 < 0,05$) menyatakan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 4.535, sementara nilai t table $\alpha = 0,05$; $N = 6$ dan $k = 2$ (t tabel = $t_{(\alpha/2 ; N-k-1)} = t_{0,05/2 ; 6-2-1} = t_{(0,025 ; 3)}$) dilihat dari distribusi tabel adalah sebesar 3.182. Nilai t hitung $4.535 > t$ tabel 3.182 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Berdasarkan hasil hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dapat diterima. Nilai signifikansi 0,022 yang lebih kecil 0,05 menyatakan menyatakan bahwa bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t hitung sebesar 4.535 yang lebih besar dari t tabel 3.182 menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

3. Uji Hipotesis 3

Hasil analisis regresi linier sederhana pada table 4.15 dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = - 609807452904.992 + 0.972 X_1 + 0.990 X_2$$

- a) Nilai a (konstanta) sebesar -609807452904.992 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) atau variabel independen sama dengan nol, maka besarnya nilai Belanja Daerah tiap daerah adalah -609.807.452.904.992. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b_1) sebesar 0.972 berarti jika Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1% maka akan menambah Belanja Daerah sebesar 9.72%. Koefisien regresi Dana Perimbangan (b_2) sebesar 0.990 berarti jika Dana Perimbangan bertambah sebesar 1% maka akan menambah Belanja Daerah sebesar 99.0%.
- b) Pengujian signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F. Nilai signifikansi yang

diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05 ($0,040 < 0,05$), sehingga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 11.325, sedangkan nilai F tabel 6.944. Nilai F hitung 11.325 lebih besar dari F tabel 6.944 ($F \text{ hitung } 11.325 > F \text{ tabel } 6.944$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Berdasarkan hasil hipotesis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dapat diterima. Nilai signifikansi 0,040 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai F hitung 11.325 yang lebih besar dari F tabel 6.944 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) Dan Dana Perimbangan (X_2) memiliki pengaruh yang baik di Parepare

Rumusan masalah pertama penelitian ini untuk mengetahui seberapa baik Pendapatan Asli Daerah (X_1) Dan Dana Perimbangan (X_2) di Parepare. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Dana Perimbangan sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.

a) Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki pengaruh yang baik di Parepare

Hasil yang diperoleh dari pengujian *One Sample T-Test* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 2.161, nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,083, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*) sebesar 3,091,390,617,080.834, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar -585,552,820,302.68 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 6,768,334,054,314.35.

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar $2.161 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.161 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75%. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,083 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75% dari nilai ideal yang diharapkan , artinya jika mengacu pada tabel klasifikasi 4.8 diatas, nilai sebesar 75% ditarik kesimpulan bahwa bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.

Nilai dugaan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah yaitu 75% dari nilai ideal yang diharapkan, maka Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. Pendapatan Asli Daerah dinilai dapat

mengelola keuangannya secara baik dan produktif. Dengan meningkatnya jumlah belanja daerah yang semakin pesat pendapatan asli daerah juga diharapkan mendapatkan sumber penerimaan bukan hanya dari sector pajak, retribusi daerah, hasil pemisahan kekayaan, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil PAS sah lainnya.

Apabila PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat. Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah.

b) Dana Perimbangan (X2) memiliki pengaruh yang baik di Parepare

Hasil yang diperoleh dari pengujian *One Sample T-Test* menunjukkan bahwa nilai tes dugaan (*test value*) sebesar 75, nilai t_{hitung} sebesar 2.188, nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,080, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*) sebesar 2,304,446,082,315.500, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar -402,670,812,929.70 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 65,011,562,977,560.70.

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dari Dana Perimbangan (X2) sebesar $2.188 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.188 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75%. Nilai

signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,080 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75% dari nilai ideal yang diharapkan , artinya jika mengacu pada tabel klasifikasi 4.8 diatas, nilai sebesar 75% ditarik kesimpulan bahwa bahwa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.

Nilai dugaan Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah yaitu 75% dari nilai ideal yang diharapkan, maka Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan yang bertujuan untuk menciptakan kesimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dinilai sudah cukup baik dalam mengelola keuangannya.

Dana perimbangan juga sudah dapat membantu PAD dalam membiaya belanja daerah. Jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Perimbangan maka Belanja Daerah akan semakin rendah. Dana perimbangan diberikan oleh kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang dananya berasal dari pendapatan APBN yang diberikan.

2. Belanja Daerah (Y) memiliki pengaruh yang baik di Parepare

Belanja daerah merupakan alokasi yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Hasil yang diperoleh dari pengujian *One Sample T-Test* menunjukkan bahwa nilai tes dugaan (*test value*) sebesar 75%, nilai t_{hitung} sebesar 2.127, nilai frekuensi distribusi (df) sebesar 5, nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*) sebesar 0,087, nilai beda rata-rata (*Mean Difference*) sebesar 1,754,246,969,042.667, nilai beda ambang bawah (*lower*) sebesar -366080389924.13 dan nilai beda ambang atas (*upper*) sebesar 3,874,574,328,009.46.

Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai t_{hitung} dari Belanja Daerah (Y) sebesar $2.217 < 2.570$. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas dimana apabila nilai $2.217 < 2.570$ maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%. Nilai signifikansi Sig. (*2-tailed*) sebesar $0,087 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%.

Berdasarkan *one sample t test* diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75%, dari nilai ideal yang diharapkan artinya jika mengacu pada tabel 4.8 klasifikasi diatas, nilai 75% dari nilai ideal sebesar 100%, sehingga kesimpulan yang diambil yaitu bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dinilai "baik".

Nilai dugaan dari Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 100%, maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% dinilai

“baik”. Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dinilai baik dalam melakukan pengeluaran dengan pelaksanaan program yang relative adil dan merata.

3. Hubungan Pendapatan Asli (X1) dan Dana Perimbangan (X2) Terhadap Belanja Daerah (Y) di Parepare

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang diukur, yakni variabel independen dan variabel dependen, variabel (X1) atau variabel Pendapatan Asli Daerah dan (X2) atau variabel Dana Perimbangan dengan variabel Y atau variabel Belanja Daerah di Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana hubungan di antara kedua variabel tersebut. Variabel ini kemudian diukur apakah terdapat hubungan Pendapatan Asli (X1) dan Dana Perimbangan (X2) Terhadap Belanja Daerah (Y) di Parepare atau tidak.

Berdasarkan tabel 4.13 *model summary* dari hasil olah data SPSS 21 dengan nilai r_{hitung} 0,940 dan nilai signifikansi f (*sig. F change*) sebesar 0,040 diatas, menunjukkan bahwa ada hubungan (korelasi) antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) dan memiliki hubungan atau korelasi positif yang didasari dari interpretasi data perolehan sebesar 0,940 dan sinifikansi sebesar 0,040. Dapat disimpulkan bahawa Ada hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y), artinya semakin baik Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2), maka semakin tinggi pula Belanja Daerah (Y). Berdasarkan tabel korelasi, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,940 memiliki nilai positif dengan kekuatan

hubungan “sangat kuat” antara (0, 80% – 1,000%). Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) memiliki hubungan yang sangat kuat.

Sedangkan berdasarkan hasil tabel *Pearson Correlation* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 0,889 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikan sebesar 0,018. Nilai korelasi (*pearson corelation*) sebesar 0,889 (0,889%), dengan mengacu pada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan maka tingkat hubungan 0,889% berada pada 0,80% - 1,000%, yang berarti “sangat kuat”. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan tingkat hubungan yang “sangat kuat”.

Dan untuk Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) 0,720 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikan sebesar 0,015. Nilai korelasi (*pearson corelation*) sebesar 0,720 (0,720%), dengan mengacu pada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan maka tingkat hubungan 0,720% berada pada 0,60% - 0,799%, yang berarti “kuat”. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan tingkat hubungan yang “kuat”.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang positif dan korelasi antara kedua variabel. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Daerah. Apabila kualitas dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan semakin ditingkatkan, maka tidak memungkiri bahwa Belanja Daerah pun akan semakin besar. Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah dalam menggunakan dan memanfaatkan secara baik dan produktif sehingga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat tetap stabil serta semakin meningkat, maka Belanja Daerah pun akan semakin meningkat pula.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2017-2019. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), sehingga hipotesis pertama diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar $-609.807.452.904.992$ dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0.972 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare dari tahun 2017-2019 adalah $Y = -609807452904.992 + 0.972 X_1$. Persamaan tersebut memiliki arti jika jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) naik satu persen (1%) maka Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar $0,972$ (97,2%). Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y) dilakukan dengan menggunakan uji t . Nilai t hitung sebesar 3.258 yang lebih besar dari t tabel 3.182 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,050 < 0,05$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) di Kota Parepare tahun 2017-2019.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2017-2019. Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Jawa Timur. Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sorongan (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

5. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare tahun 2017-2019. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), sehingga hipotesis kedua diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar $-609.807.452.904.992$ dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0.990 sehingga persamaan regresi untuk

mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare dari tahun 2017-2019 adalah $Y = - 609807452904.992 + 0.990 X_2$. Persamaan tersebut memiliki arti jika jika Dana Perimbangan (X_2) naik satu persen (1%) maka Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,990 (99,0%). Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung sebesar 4.535 yang lebih besar dari t tabel 3.182 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) di Kota Parepare tahun 2017-2019.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2017-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Perimbangan maka Belanja Daerah akan semakin rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husna Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Takalar. Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian A. Firman H. (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

6. Dana Perimbangan yang paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah (Y) di Parepare

Berdasarkan pada Hasil Analisis Regresi Linear Berganda didapatkan nilai Koefisien Regresi X_1 (β_1 = Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,972 dan Koefisien Regresi X_2 (β_2 = Dana Perimbangan) sebesar 0,990.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang menyebutkan bahwa variabel yang memiliki nilai Koefisien Regresi (X_n, β_n) tertinggi dengan nilai yang menjauhi angka nol makanya variabel tersebut merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh dibandingkan variabel yang lainnya.

Jadi variabel Dana Perimbangan merupakan yang paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dimana nilai koefisiennya sebesar 0,990 dibandingkan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah yang nilai koefisiennya sebesar 0,972. Karena X_2 (β_2 = Dana Perimbangan) > X_1 (β_1 = Pendapatan Asli Daerah) dimana $0,990 > 0,972$. Hal ini sesuai dengan hipotesis, maka H_6 diterima.

Keterangan diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dan Variabel Dana Perimbangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan variabel Dana Perimbangan yang paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian *One Sample T-test* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 2.161. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar $2.161 < 2.570$. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,083 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 75% ini menunjukkan bahwa bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”. Sedangkan Hasil dari pengujian *One-Sample Test* menunjukkan nilai t_{hitung} dari Dana Perimbangan (X2) sebesar 2.188. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dari Dana Perimbangan (X2) sebesar $2.188 < 2.570$. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,080 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebesar 75% ini menunjukkan bahwa bahwa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.
2. Hasil dari pengujian Tabel *One-Sample Test* diatas menunjukkan nilai t_{hitung} dari Belanja Daerah (Y) sebesar 2.217. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ Belanja Daerah $2.217 < 2.570$.. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar $0,087 > 0,05$, maka H_0 diterima bahwa Belanja Daerah (Y) sama dengan nilai 75% ini menunjukkan bahwa bahwa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dinilai “baik”.
3. Hasil dari pengujian korelasi *Product Moment* diketahui bahwa ada hubungan (korelasi) antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan

(X₂) terhadap Belanja Daerah (Y) dan memiliki hubungan atau korelasi positif. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X₁) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 0,889 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X₁) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikan sebesar 0,018. Nilai korelasi (*pearson corelation*) sebesar 0,889 (0,889%) berarti “sangat kuat”. Sedangkan untuk Nilai korelasi (*Pearson Correlation*) Hubungan Dana Perimbangan (X₂) terhadap Belanja Daerah (Y) 0,720 yang berarti bahwa korelasi atau Hubungan Dana Perimbangan (X₂) terhadap Belanja Daerah (Y) bernilai positif dan memiliki signifikan sebesar 0,015. Nilai korelasi (*pearson corelation*) sebesar 0,720 (0,720%), berarti “kuat”.

4. Hasil dari pengujian Regresi Linear Sederhana menunjukkan Variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$ menyatakan menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t_{hitung} sebesar $3,258 > t_{tabel} 3,182$ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
5. Hasil dari pengujian Regresi Linear Sederhana menunjukkan Variabel Dana Perimbangan (X₂) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ menyatakan menyatakan bahwa bahwa Dana Perimbangan (X₂) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai t_{hitung} sebesar $4,535 > t_{tabel} 3,182$ menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

6. Hasil dari pengujian tabel *Coefficient* Analisis Regresi Linear Berganda didapatkan nilai Koefisien Regresi X_1 (β_1 = Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,972 dan Koefisien Regresi X_2 (β_2 = Dana Perimbangan) sebesar 0,990. Jadi variabel Dana Perimbangan merupakan yang paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dimana nilai koefisiennya sebesar 0,990 dibandingkan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah yang nilai koefisiennya sebesar 0,972. Karena X_2 (β_2 = Dana Perimbangan) $>$ X_1 (β_1 = Pendapatan Asli Daerah) dimana $0,990 > 0,972$.

B. Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Perimbangan dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Kota Parepare supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data PAD, DAPER, Dan Belanja Daerah

APBD 2017
Kota Pare-pare
Data per 26 Mei 2017 (Anggaran) dan 12 November 2018 (Realisasi)

Akun	Anggaran	Realisasi	%
PAD	997.417.871.424,00	917.926.285.143,00	100,20 %
Pajak daerah	19.530.875.000,00	27.856.992.427,00	142,63 %
Retribusi daerah	7.653.925.200,00	7.504.251.331,00	98,04 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.089.308.027,00	6.146.087.773,00	100,93 %
Lain-lain PAD yang sah	107.071.160.520,00	99.114.332.858,00	92,57 %
Daper	637.484.105.000,00	674.911.159.746,00	105,87 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.237.280.000,00	19.106.889.524,00	82,23 %
Dana alokasi umum	462.883.790.000,00	454.752.410.000,00	98,24 %
Dana alokasi khusus	151.363.035.000,00	201.051.860.222,00	132,83 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	219.588.497.677,00	76.727.916.418,00	34,94 %
Hibah	3.200.000.000,00	0,00	0,00 %
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	47.493.272.477,00	43.605.884.454,00	91,81 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	166.229.838.000,00	7.500.000.000,00	4,51 %
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	2.665.387.200,00	7.439.598.400,00	279,12 %
Lain-lain	0,00	18.182.433.564,00	-
Belanja	1.026.887.348.924,00	969.858.823.856,00	94,45 %
Belanja Tidak Langsung	360.576.772.978,00	338.094.096.136,00	93,76 %
Belanja Pegawai	324.937.048.918,00	300.910.954.968,00	92,61 %

Belanja Bunga	4.500.000.000,00	2.174.522.176,00	48,32 %
Belanja Subsidi	2.919.420.000,00	1.287.072.000,00	44,09 %
Belanja Hibah	24.414.400.000,00	32.358.819.656,00	132,54 %
Belanja Bantuan sosial	1.000.000.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	805.904.060,00	805.904.056,00	100,00 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	556.823.280,00	27,84 %
Belanja Langsung	666.310.575.946,00	631.764.727.720,00	94,82 %
Belanja Pegawai	19.047.555.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Barang dan Jasa	293.861.834.734,00	323.521.065.652,00	110,09 %
Belanja Modal	353.401.186.212,00	308.243.662.068,00	87,22 %
Pembiayaan	29.469.477.500,00	78.384.398.373,00	265,99 %
Penerimaan	45.694.552.500,00	81.150.255.404,00	177,59 %
SiLPA TA sebelumnya	45.694.552.500,00	81.150.255.404,00	177,59 %
Pengeluaran	16.225.075.000,00	2.765.857.031,00	17,05 %
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.500.000.000,00	0,00	0,00 %
Pembayaran Pokok Utang	3.725.075.000,00	2.765.857.031,00	74,25 %

APBD 2018 dan Realisasi APBD 2018
Kota Pare-pare
Anggaran Murni dan Realisasi APBD TA 2018 per 10 September 2020

Akun	Anggaran	Realisasi	%
PAD	910.963.347.048,00	823.930.414.122,00	92,52 %
Pajak daerah	22.150.000.000,00	30.348.994.084,00	137,02 %
Retribusi daerah	7.026.105.000,00	7.627.236.207,00	108,56 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.146.087.772,00	6.473.337.284,00	105,32 %
Lain-lain PAD yang sah	109.885.506.520,00	89.893.816.135,00	81,81 %
Daper	608.741.841.000,00	599.611.905.270,00	98,50 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21.260.221.000,00	17.329.795.867,00	81,51 %
Dana alokasi umum	454.752.410.000,00	454.752.410.000,00	100,00 %
Dana alokasi khusus	132.729.210.000,00	127.529.699.403,00	96,08 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	104.211.330.402,00	89.975.125.142,00	86,34 %
Hibah	23.191.000.000,00	19.038.931.979,00	82,10 %
Dana darurat	0,00	0,00	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	53.104.943.202,00	38.291.216.442,00	72,10 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	25.250.000.000,00	25.250.000.000,00	100,00 %
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	2.665.387.200,00	7.394.976.721,00	277,44 %
Lain-lain	0,00	0,00	
Belanja	875.365.795.694,00	790.230.343.853,00	
Belanja Tidak Langsung	375.833.395.187,00	351.790.254.723,00	93,60 %
Belanja Pegawai	335.193.671.127,00	301.159.869.898,00	89,85 %

Belanja Bunga	4.500.000.000,00	1.994.898.969,00	44,33 %
Belanja Subsidi	2.919.420.000,00	2.234.500.000,00	76,54 %
Belanja Hibah	29.414.400.000,00	45.389.213.800,00	154,31 %
Belanja Bantuan sosial	1.000.000.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	805.904.060,00	805.904.056,00	100,00 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	205.868.000,00	10,29 %
Belanja Langsung	499.532.400.507,00	438.440.089.130,00	87,77 %
Belanja Pegawai	27.946.782.336,00	0,00	0,00 %
Belanja Barang dan Jasa	312.289.316.921,00	309.261.761.164,00	99,03 %
Belanja Modal	159.296.301.250,00	129.178.327.966,00	81,09 %
Pembiayaan	17.204.925.000,00	-7.229.541.960,00	-42,02 %
Penerimaan	26.180.000.000,00	786.315.071,00	3,00 %
SiLPA TA sebelumnya	26.180.000.000,00	786.315.071,00	3,00 %
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	-
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	-
Pengeluaran	8.975.075.000,00	8.015.857.031,00	89,20 %
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal (Investasi)	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00 %

Daerah			%
Pembayaran Pokok Utang	3.725.075.000,00	2.765.857.031,00	74,25 %
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	-
Lainnya	0,00	0,00	-



Realisasi APBD 2019
Kota Pare-pare
Realisasi APBD 2019 (per 21 Oktober 2020)

Akun	Anggaran	Realisasi	%
PAD	931.658.852.156,00	966.446.932.592,00	90,77 %
Pajak daerah	28.325.000.000,00	33.921.012.866,00	119,76 %
Retribusi daerah	7.236.888.150,00	7.491.169.079,00	103,51 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.473.337.284,00	6.935.032.137,00	107,13 %
Lain-lain PAD yang sah	109.885.506.520,00	89.544.913.277,00	81,49 %
Daper	660.209.347.000,00	645.718.136.327,00	97,81 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	19.882.225.000,00	13.893.249.840,00	69,88 %
Dana alokasi umum	474.983.198.000,00	474.983.198.000,00	100,00 %
Dana alokasi khusus	165.343.924.000,00	156.841.688.487,00	94,86 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	119.528.773.202,00	182.836.668.906,00	152,96 %
Hibah	21.966.000.000,00	19.471.160.000,00	88,64 %
Dana darurat	0,00	0,00	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	61.079.924.202,00	52.816.252.522,00	86,47 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	28.982.849.000,00	28.982.849.000,00	100,00 %
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	7.500.000.000,00	81.566.407.384,00	1.087,55 %
Lain-lain	0,00	0,00	-
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-
Belanja	939.823.221.581,00	923.316.280.348,00	98,24 %
Belanja Tidak Langsung	366.181.280.025,00	355.333.854.644,00	97,04 %
Belanja Pegawai	343.375.375.965,00	317.144.682.930,00	92,36 %
Belanja Bunga	2.500.000.000,00	1.952.594.033,00	78,10 %

Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Hibah	14.500.000.000,00	32.808.940.879,00	226,27 %
Belanja Bantuan sosial	2.000.000.000,00	2.527.500.000,00	126,38 %
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	805.904.060,00	822.636.802,00	102,08 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	77.500.000,00	3,88 %
Belanja Lainnya	0,00	0,00	-
Belanja Langsung	573.641.941.556,00	567.982.425.704,00	99,01 %
Belanja Pegawai	26.442.264.000,00	49.225.000,00	0,19 %
Belanja Barang dan Jasa	338.473.637.194,00	324.451.157.204,00	95,86 %
Belanja Modal	208.726.040.362,00	243.482.043.500,00	116,65 %
Pembiayaan	8.164.369.425,00	14.825.479.046,00	181,59 %
Penerimaan	16.180.369.425,00	22.841.336.077,00	141,17 %
SiLPA TA sebelumnya	16.180.369.425,00	22.841.336.077,00	141,17 %
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	-
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	-
Pengeluaran	8.016.000.000,00	8.015.857.031,00	100,00

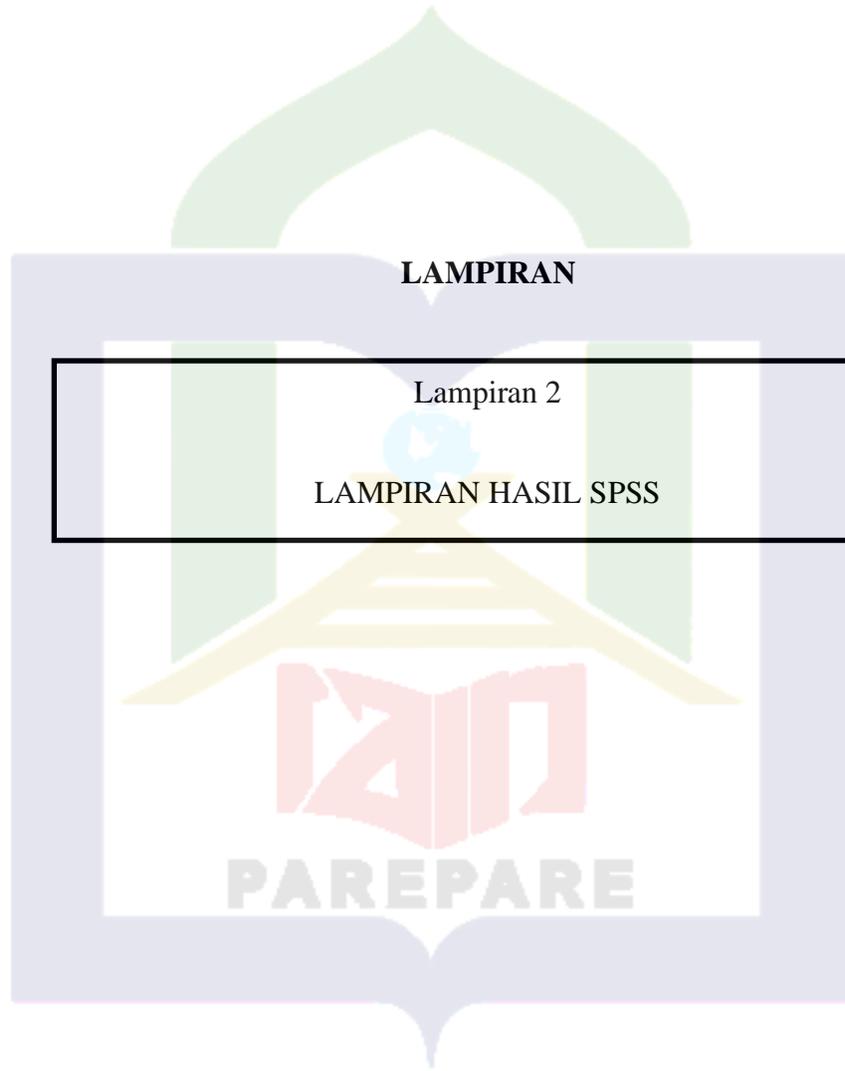
			%
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00 %
Pembayaran Pokok Utang	2.766.000.000,00	2.765.857.031,00	99,99 %
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	-



LAMPIRAN

Lampiran 2

LAMPIRAN HASIL SPSS



1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	6	823930414122	997417871424	924723950414.17	59107031175.969
Dana Perimbangan	6	599611905270	674911159746	637779415723.83	29137324257.748
Belanja Daerah	6	790230343853	1026887348924	920913635709.33	81415149664.893
Valid N (listwise)	6				

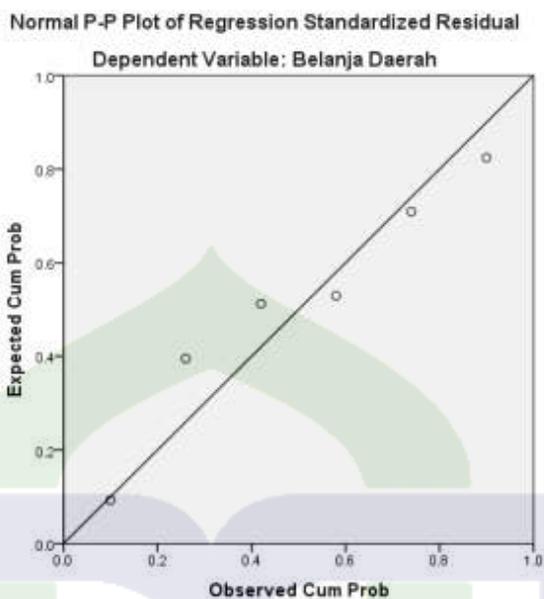
2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001335
	Std. Deviation	27843507425
	Absolute Differences	.192
Most Extreme Differences	Positive	.118
	Negative	-.192
Kolmogorov-Smirnov Z		.471
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979

a. Test distribution is Normal.

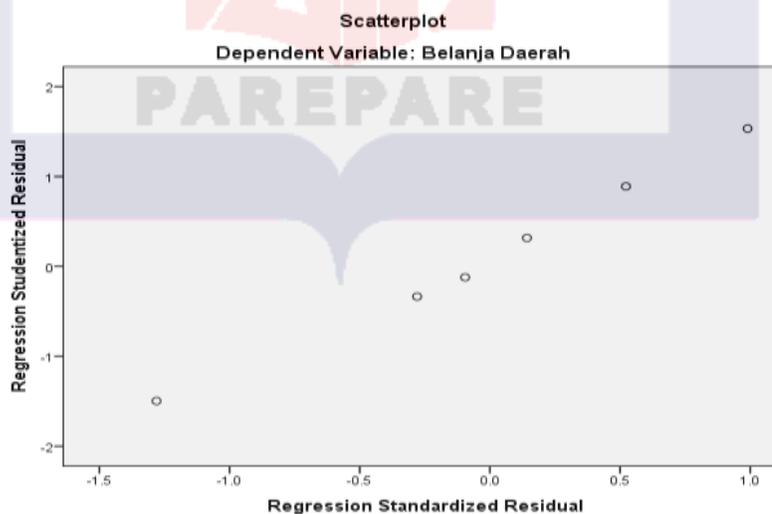
b. Calculated from data.



3. Hasil Uji Multikolienaritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pendapatan Asli Daerah	.732	1.366
Dana Perimbangan	.732	1.366

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



5. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	852829446.39971
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

6. Hasil Uji *Sample T-test Statistic* Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan Asli Daerah	6	924723950414.17	59107031175.969	24130344431.983
Dana Perimbangan	6	637779415723.83	29137324257.748	11895262816.917

7. Hasil Uji *One Sample Test* Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2)

One-Sample Test

	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pendapatan Asli Daerah	2.161	5	.083	3091390617 080.834	- 5855528203 02.68	6768334054314. 35
Dana Perimbangan	2.188	5	.080	2304446082 390.500	- 4026708129 29.70	5011562977560. 70

8. *One Sample Statistics* Belanja Daerah (Y)

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Belanja Daerah	6	920913635709.33	81415149664.893	33237595668.552

9. *One Sample Test* Belanja Daerah (Y)

One-Sample Test

	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Belanja Daerah	2.127	5	.087	1754246969 042.667	- 366080389924.1 3	3874574328009.4 6

10. *Correlations* Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Correlations

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	.889*
	Sig. (2-tailed)		.018
	N	6	6
Belanja Daerah	Pearson Correlation	.889*	1
	Sig. (2-tailed)	.018	
	N	6	6

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

11. *Correlations* Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

		Dana Perimbangan	Belanja Daerah
Dana Perimbangan	Pearson Correlation	1	.720
	Sig. (2-tailed)		.015
	N	6	6
Belanja Daerah	Pearson Correlation	.720	1
	Sig. (2-tailed)	.015	
	N	6	6

12. Hasil Uji Koefisien (R) dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 ^a	.883	.805	35945813519

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

13. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29265828446131	2	14632914223	11.325	.040 ^b
	366000000.000		06568300000		
1 Residual	38763045286532	3	12921015095		
	96000000.000		51098700000		
Total	33142132974784	5			
	663000000.000				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

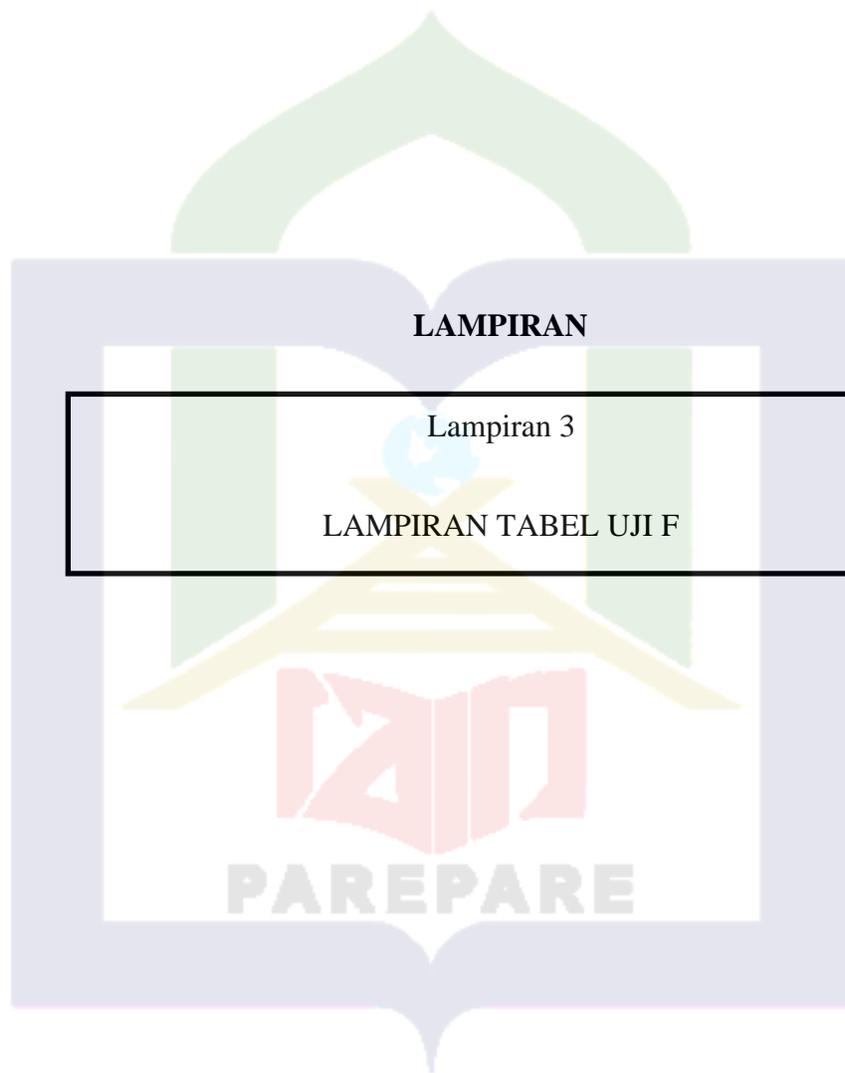
14. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-361367117 609807452904. 992	399.071		-1.688	.190
1 Pendapatan Asli Daerah	.972	.318	.706	3.258	.047
Dana Perimbangan	.990	.645	.354	1.535	.022

a. Dependent Variable: Belanja Daerah





LAMPIRAN

Lampiran 3

LAMPIRAN TABEL UJI F

Tabel Uji F

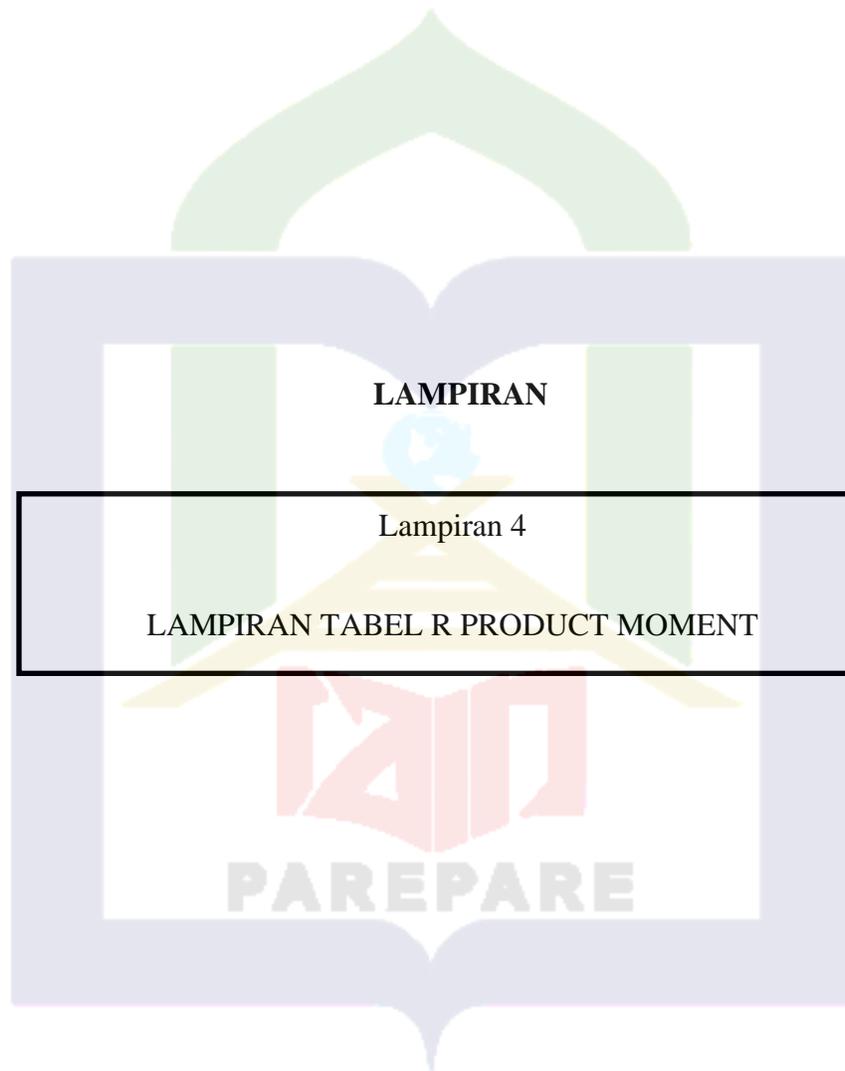
$\alpha = 0,05$	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161,44 8	199,500	215,70 7	224,583	230,162	233,98 6	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278

30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089

64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082
67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035

98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032





LAMPIRAN

Lampiran 4

LAMPIRAN TABEL R PRODUCT MOMENT

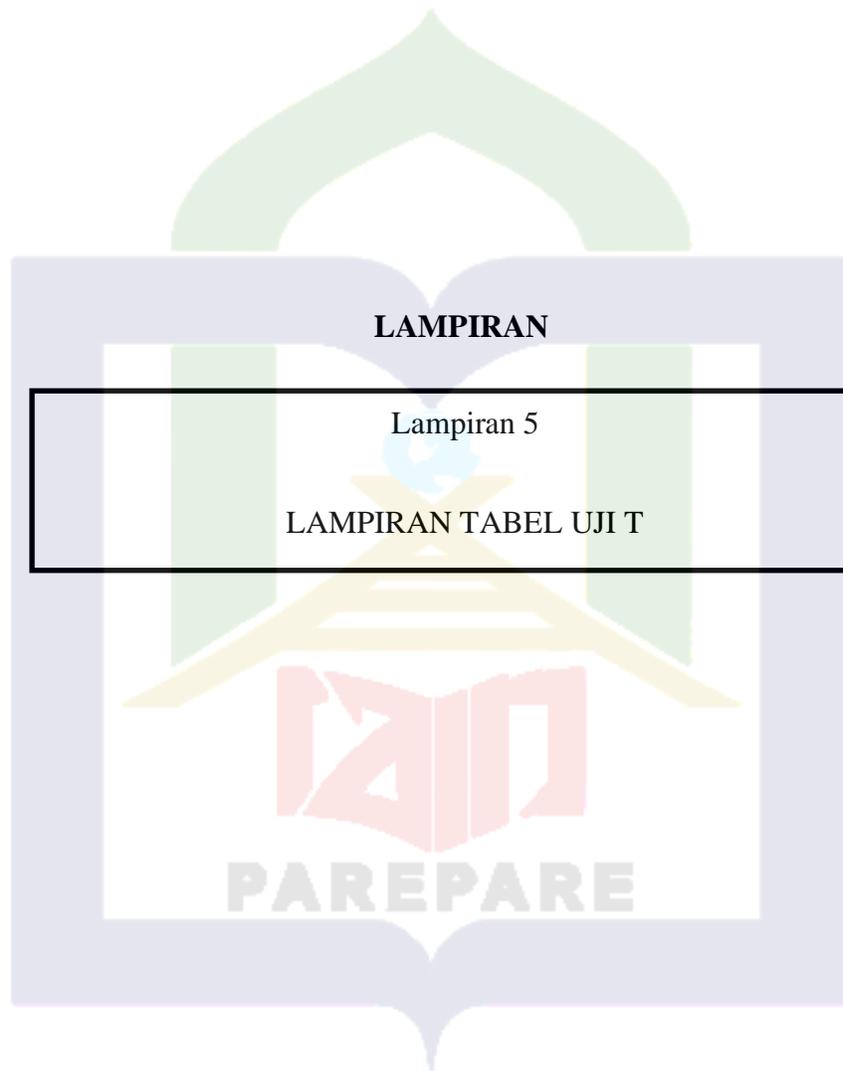
Tabel r Product Moment**Pada Sig.0,05 (Two Tail)**

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134

14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129

31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126





LAMPIRAN

Lampiran 5

LAMPIRAN TABEL UJI T

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	21

22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	30
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	31
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	32
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	33
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	34
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	35
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	36
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	37
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	38
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708	39
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	40
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	41
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	42
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	43
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	44
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	45

46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	46
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	47
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	48
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	49
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	50
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	51
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	52
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	53
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	54
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	55
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	56
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	57
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	58
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	59
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	60
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	61
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	62
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	63
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	64
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	65
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	66
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	67
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	68
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	69

70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	70
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	71
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	72
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	73
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	74
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	75
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	76
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	77
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	78
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	79
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	80
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	81
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	82
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	83
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	84
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	85
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	86
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	87
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	88
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	89
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	90
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	91
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	92
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	93

94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	94
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	95
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	96
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	97
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	98
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	99
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	Inf.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim'

- Bawono, Icut Rangga, Dan Mochamad Novelsyah. 2012. *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat
- Darise, Nurlan. "Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)". *PT Indeks, Jakarta*, 2008
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Handayani, Kristina. 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi". Skripsi : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Indraningrum, Try. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Kakasih, Rendy Armando, George MV Kawung, Dan Steeva YL Tumangkeng. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18.2, 2018
- Mardiasmo. "Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001". Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002
- Marlia, Rima. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Bandung)". Universitas Komputer Indonesia
- Muchlis, Bahtiar Arif dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia
- Nordiawan, D., Dan A. Hertianti. "Akuntansi Sektor Publik Edisi 2". Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Penyusun, Tim. 2020, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers
- Prakosa, Kesit Bambang. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY)". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 8.2, 2004
- Purnomo, Budi S. "Obligasi Daerah". *Bandung: Alfabeta*, 2009
- Purwanto, Fiona Puspita. 2011, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal". Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

- Rahmalia, Rizka. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)". Skripsi : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang
- Rahmawati, Masayu, Dan Catur Martian Fajar. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung". *Jurnal Kajian Akuntansi 1.1*, 2017
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Setiawan, Anjar. 2010. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Sholeh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2010. "*Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*". Bandung: Fokusmedia
- Siergar, Endang Maya Lestari Siergar. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara". Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Sorongan, Juliana Florence. "Analisis Hubungan DAU, PAD Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1.3*, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alvabet, 2011
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sulistyowati, Diah. 2011. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja". Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang
- Wahyuni, Husni. 2021. "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar". Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* . Jakarta: Rajawali Pers, 2009

BIODATA PENULIS



Ririn Anggreani, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 19 Juni 1999. Merupakan anak pertama dari bapak Muhammad Amin dan ibu Jamilah. Kini penulis beralamat di Jln. Wirabuana No.31 A, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK HIGSDI Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 48 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Parepare Jurusan Multimedia. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Kota Parepare, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Walikota Kota Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare.